

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, Indonesia memfokuskan diri pada pembangunan nasional, tujuan pembangunan nasional dilakukan dengan dasar menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, usaha yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya pembangunan daerah yang di dukung dengan pengelolaan kekayaan yang dimiliki setiap daerah. Visualisasi pembangunan daerah bisa diimplementasikan melalui hak dan wewenang yang akan diberikan kepada daerah dalam mengelola potensi daerah tersebut secara mandiri bisa disebut juga Otonomi Daerah. Hal yang mengatur Otonomi daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah sebanyak 2 (dua) kali perubahan.

Perubahan peraturan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 merupakan perubahan yang kedua. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap daerah dapat mengatur, menata, mengelola, mengendalikan, serta mengembangkan daerahnya baik sektor pemerintahannya maupun kekayaan daerah yang dimiliki setiap daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (UU No 9, 2015). Dengan adanya Otonomi Daerah harapan pemerintah pusat salah satunya yaitu dapat menjadikan pemerintah agar mandiri dalam mengatur daerahnya, selain itu mendorong pemberdayaan masyarakat.

Implementasi pemerintah daerah merupakan upaya untuk fokus pada implementasi kemakmuran masyarakat dengan keberadaan berbagai perbaikan

sambil memperhatikan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh sistem negara bagian Indonesia tunggal. Implementasi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditunjukkan dalam sistem yang terdesentralisasi. Desentralisasi adalah bentuk upaya dari otoritas lokal untuk menjalankan kekuasaannya diajukan oleh pemerintah pusat, kemudian dilatih dalam pelaksanaan otonomi kawasan. Otonomi regional adalah bentuk kebebasan yang dimiliki oleh otoritas lokal dalam menyusun, mengelola, dan menerapkan semua kebutuhan regional seperti melatih peraturan regional dan menciptakan kebijakan dalam manajemen keuangan regional yang berafiliasi.

Dalam mengelola keuangan setiap daerah harus bertanggung jawab atas keuangan yang dapat dilakukan dengan cara taat dan tertib pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, efisiensi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab atas asas keadilan dan kepatuhan (UU No. 32, 2004). Hal tersebut sangat penting untuk diawasi dengan dilakukannya kegiatan otonomi daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dapat disebut dengan sebagai hal yang wajib dirancang setiap pemerintahan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan. LPPD ini harus diserahkan ke pemerintah pusat. Isi dari LPPD tentunya akan berbeda-beda bergantung pada karakteristik setiap pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

Kebijakan yang harus diimplementasikan pada otonomi daerah mengharuskan masing-masing daerah agar mempunyai sistem manajemen keuangan yang baik ketika melakukan tugas untuk memberikan kesejahteraan dan

mendukung pembangunan nasional. Penggunaan LPPD saat ini adalah melihat manajemen keuangan pemerintah daerah. Dilakukan agar biasa memeriksa dan memantau transparansi manajemen keuangan daerah biasa menggunakan LPPD sehingga dihindarkan dari tindak kecurangan. Melakukan pengawasan adalah hal yang sangat penting, dengan pengawasan dapat secara teratur memeriksa laporan keuangan dengan berkala untuk menumbuhkan rasa percaya terkait dengan kesamaan laporan keuangan berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan independen dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Output dari pemeriksaan yang akan disajikan dalam ringkasan hasil didalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) terdiri dari pertumbuhan ekonomi, temuan audit, kesimpulan dan rekomendasi/saran (UU No 15, 2006)

Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang di dalamnya berisi seluruh nilai unit usaha di suatu periode. Jika ingin mengetahui suatu kegiatan ekonomi menghasilkan nilai yang positif atau nilai yang negatif dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Peningkatan semua kegiatan ekonomi pada tahap tertentu dapat menunjukkan kegiatan ekonomi yang bernilai positif, berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi berada di nilai yang negatif dapat diartikan dalam periode perekonomian di tahapan tertentu tersebut mengalami penurunan. Data Produksi Domestik Bruto (PDB) dapat digunakan untuk mengukur bagaimana kondisi ekonomi di suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi menggunakan sejumlah faktor pendukung seperti kelimpahan sumber daya alam dengan bekerja sama peran teknologi yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat sesuai dengan potensi sumber daya alam yang akan mendorong otoritas lokal untuk menunjukkan kinerja yang baik dari pemerintah daerah.

Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada Laporan Keuangan Daerah (LKPD) di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2021.



Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2018-2021

Gambar 1.1 memmplihatkan pertumbuhan ekonomi menurut LKPD dalam empat tahun terakhir mengalami naik turun. Fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi pada LKPD mengalami perbedaan disetiap tahunnya. Pada 2018 pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur rata-rata berada di angka 5% dan dua kota diangka 6%. Pada tahun 2019 mengalami perubahan di beberapa kota. Tahun 2020 mengalami penrunan yang cukup signifikan dikarenakan adanya bencana alam covid-19 semua kabupaten/kota berada di angka

negatif. Tahun 2021 menjadi tahun kebangkitan ekonomi di Jawa Timur beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan ekonomi, ada satu kota berada di angka 2%, ada lima kota berada di angka 3% dan empat kota di angka 4%. Grafik tersebut juga menjelaskan pemerintah daerah di Jawa Timur terus memperhatikan penyajian laporan keuangan dengan bertanggung jawab mengelola keuangan daerah untuk pelayanan publik. Setiap pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi untuk memperbaiki LKPD untuk bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dengan grafik diatas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Temuan audit adalah hasil pemeriksaan yang harus dilaporkan sebagai tambahan atas opini audit. Temuan audit terdiri atas permasalahan yang terkait dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penemuan kelemahan SPI terdiri atas tiga bagian sebagai berikut, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Sistem Pengendalian Intern adalah elemen penting yang diperintahkan dengan baik dan dikelola oleh semua pemerintah daerah melalui implementasi otonomi lokal. Karena ruang lingkup otoritas diberikan, jika SPI tidak ditempatkan dengan benar, itu bisa berdampak negatif. Jika pemerintah daerah tidak diakhiri dengan struktur SPI yang baik, munculnya penipuan bahkan lebih besar. Jika tidak terkait dengan ketentuan hukum, ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak terduga, potensi kerugian, kurangnya pendapatan, dan penyimpangan dalam kendali.

Untuk semester I tahun 2017, BPK telah memeriksa 542 LKPD Tahun 2017. LKPD pada tahun 2017 terdiri dari 34 Laporan Keuangan pemerintah provinsi, 415 Laporan Keuangan pemerintah kabupaten, dan 93 Laporan Keuangan pemerintah kota. Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan temuan-temuan berdasarkan LKPD 2017 yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Temuan Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	7.020
II	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan	
1	Kerugian	5.465
2	Penyimpangan Administrasi	2.651
	Subtotal	8.116
	Total	15.136

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa terdapat banyak permasalahan yang ditemukan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang pada LKPD tahun 2017. Dalam permasalahan kelemahan SPI, ditemukan sejumlah 7.020. Sedangkan dalam ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang ditemukan 8.116 permasalahan, dengan 5.465 permasalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara dan penyimpangan administrasi dengan jumlah permasalahan sebesar 2.651. Angka ini tentu masih sangat besar yang menunjukkan banyak pemerintah daerah masih mengabaikan peraturan yang berlaku secara sengaja atau tidak.

Kinerja pemerintahan daerah yang baik dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat dengan pengelolaan yang baik dapat dilakukan untuk

memaksimalkan pelayanan publik (Aswar, 2019). Pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan daerah kini semakin mendapat perhatian dengan diberlakukannya otonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dan temuan audit merupakan beberapa data keluaran audit yang dapat digunakan untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, terlihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi yang signifikan belum diikuti dengan penurunan jumlah temuan audit yang signifikan sebagai gambaran kinerja pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia masih belum baik. Utamanya tentu dikarenakan masih lemahnya SPI yang diterapkan. Karena SPI yang baik tentu akan membatasi peluang terjadinya tindak kecurangan.

Penelitian Tama (2018) menunjukkan dari hasil temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal yang serupa juga dihasilkan oleh penelitian Susanti, Amir, dan Tiswiyanti (2016) yang menyatakan hasil dari temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan, penelitian Masdianti dan Erawati (2016) ditemukan hasil bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Nasution dan Pangabean (2017) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, penelitian Martantri (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Adanya penelitian yang menghasilkan temuan yang berbeda-beda dan kurangnya bukti empiris dari penelitian yang ada mengenai

hubungan antar variabel dalam penelitian ini, terutama kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena yang banyak tersedia adalah kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan yang telah dideskripsikan, dapat diketahui bahwa kinerja pemerintahan daerah di Indonesia telah menunjukkan peningkatan merujuk pada hasil pemeriksaan LKPD yang dilakukan oleh BPK. Akan tetapi, hasil pemeriksaan masih ada beberapa yang mengandung temuan-temuan pemeriksaan yang terkait dengan permasalahan kelemahan-kelemahan SPI. Hasil pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh BPK dapat menjadi salah satu acuan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

- a. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur?
- b. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

- a. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.
- b. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berikut:

a. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti empiris tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktikal

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dalam melayan masyarakat.

